

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA

TRIWULAN IV TAHUN 2020





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN IV TAHUN 2020

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan obat dan makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2020 ini pandemi COVID 19 yang melanda dunia mampu mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dan kebiasaan kita. Tidak terkecuali juga dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, beberapa kinerja yang telah dicapai Badan POM diantaranya adalah penerbitan 155.862 NIE, pemeriksaan di 23.907 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 62.458 sampel, 197 perkara, dan 84 kegiatan pelaksanaan KIE.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 16 Maret 2021

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
HIGHLIGHT.....	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	4
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan.....	5
II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	10
III. Standardisasi.....	13
IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan.....	15
V. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	15
VI. Digitalisasi Pelayanan Publik.....	19
VII. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	21
VIII. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ..	23
IX. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum).....	27
X. Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri.....	28
XI. Pengelolaan Anggaran.....	29
XII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	29
PENUTUP	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2020	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan IV Tahun 2020	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	6
Gambar 5.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) s.d. Triwulan IV Tahun 2020	7
Gambar 6.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) s.d. Triwulan IV Tahun 2020	7
Gambar 7.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2020.....	8
Gambar 8.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2020	8
Gambar 9.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2020	9
Gambar 10.	Profil Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan IV Tahun 2020	9
Gambar 11.	Perkembangan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari - Desember 2020)	10
Gambar 12.	Data Peta Rawan Kasus Yang Telah Diverifikasi	10
Gambar 13.	Peta Rawan Kasus Skala Nasional Semester II Tahun 2020.....	11
Gambar 14.	Data Jenis Kejahatan dan Kasus Semester II Tahun 2020	11
Gambar 15.	Grafik Wilayah Sumber Per Komoditi	12
Gambar 16.	Grafik Pemberian Pelayanan Informasi Kepada Media Periode Januari - Desember 2020	15
Gambar 17.	Persentase Pelaksanaan Wawancara Langsung dan Jawaban Tertulis Kepada Media Periode Januari – Desember 2020.....	15
Gambar 18.	Pertumbuhan Audience Media Sosial Badan POM Triwulan IV Tahun 2020	16
Gambar 19.	Total Engagement Media Sosial Badan POM Triwulan IV Tahun 2020	16
Gambar 20.	Top Engagement Content pada Platform <i>Facebook</i> Triwulan IV Tahun 2020	16
Gambar 21.	Top Engagement Content pada Platform Instagram Triwulan IV Tahun 2020.....	16
Gambar 22.	Tonalitas Pemberitaan tentang Badan POM Periode Januari – Desember 2020	17
Gambar 23.	Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Periode Januari - Desember 2020	17
Gambar 24.	Sosialisasi Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM 2020 tanggal 23 November 2020.....	24
Gambar 25.	Pelantikan 475 Pejabat Fungsional Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi tanggal 28 Desember 2020 secara luring dan daring.....	25
Gambar 26.	Evaluasi RB BPOM Tahun 2020.....	25
Gambar 27.	Pelaksanaan Audit Surveilans pada Manajemen Puncak BPOM pada tanggal 19 Oktober 2020 dan Audit Sertifikasi Stage 2 QMS ISO 9001:2015 di Loka POM Banggai tanggal 2 November 2020.....	26
Gambar 28.	Pelaksanaan Exit Meeting Audit Surveilans dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 BPOM pada tanggal 10 November 2020.....	26



BADAN POM

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN IV TAHUN 2020

Pastikan Pangan Aman di Pasar Tradisional melalui Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Lampung / Jumat(16/10/2020)



Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito memberikan penghargaan kepada Pasar Way Halim, pemenang terbaik lomba pasar percontohan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Bandar Lampung. Penilaian Lomba Pasar Percontohan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya telah dilakukan pada tahun 2019. Penilaian dilakukan terhadap aspek kebijakan pemerintah daerah, hasil survei pasar ber kriteria baik, temuan pangan mengandung bahan berbahaya <5%, dan tindak lanjut temuan pelanggaran oleh pedagang.

Kepala Badan POM mengungkapkan ada tiga pemenang Lomba Pasar Percontohan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Pemenang pertama adalah Pasar Way Halim di Bandar Lampung. Kemudian ada Pasar Bebas Banjir di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, dan Pasar Taman Telihan di Kota Bontang Kalimantan Timur. Hari Kamis (15/10) Kepala Badan POM telah mengunjungi Pasar Way Halim dan melihat langsung pasar ini layak menjadi percontohan untuk pasar-pasar lain di Indonesia.

Bersama Badan POM, Milenial Jadi Pejuang Pangan

“Generasi Millenial, Tingkatkan Kesehatan dengan Sadar Pangan Aman. Aksi Kita Adalah Masa Depan Kita”. Demikian tema yang diangkat Badan POM dalam acara Gebyar Keamanan Pangan bersama milenial. Acara ini digelar dalam rangka Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, serta Sumpah Pemuda ke-92 yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Kurang lebih 1.400 perwakilan siswa SMA/SMK/Madrasah Aliyah dan mahasiswa dari 34 provinsi di seluruh Indonesia hadir secara virtual dalam acara ini.

Kepala Badan POM menyampaikan bahwa kebiasaan konsumsi pangan aman saat pandemi perlu terus dibangun. Tetap menjaga kesehatan adalah bentuk investasi bagi masa depan. Kebiasaan konsumsi pangan aman perlu dibangun, salah satunya karena sejak bulan April tahun ini, terdapat peningkatan belanja pangan secara online sebesar 31%. Pada bulan September, Badan POM telah mengusulkan *take down* terhadap 12.427 link situs atau *platform* terkait pangan olahan yang tidak memenuhi syarat/ketentuan.

Jakarta / Selasa (28/10/2020)



Genjot Stabilitas Ekonomi Nasional, Badan POM Terus Lakukan Pendampingan Kepada Pelaku UMKM

Kediri / Jumat (06/11/2020)



Dalam rangka kunjungan kerja di Jawa Timur, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito beserta jajaran bertolak ke Kediri untuk melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM). Pada kesempatan tersebut Kepala Badan POM menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE), sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap, dan sertifikat Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) kepada pelaku UMKM pangan dan pelaku usaha Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) di Kediri.

"UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Karena itu Badan POM selalu berusaha menjangkau UMKM dan mendampingi sehingga dapat menghasilkan produk yang berdaya saing," papar Kepala Badan POM.

Solidaritas di Tengah Pandemi, Badan POM Berikan Pelatihan Dukung Pembentukan FDA Palestina

Untuk mendukung pembentukan FDA Palestina, Badan POM RI menyelenggarakan *Virtual Training* bertema "*Indonesian FDA's Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority*". Forum ini merupakan bentuk solidaritas Indonesia untuk membantu peningkatan kapasitas fungsi regulator Palestina melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS).

Pada pembukaan forum ini, Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito menegaskan komitmennya untuk memberikan bantuan teknis kepada Otoritas Regulator Palestina guna meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Palestina. "Situasi pandemi ini tidak menghalangi kami melanjutkan komitmen teguh KSS kepada Palestina, termasuk berkontribusi dalam pembentukan FDA Palestina yang independen," tegasnya.

Jakarta / Senin - Rabu (23 - 25 /11/2020)



Badan POM Berantas Peredaran Kosmetik Impor Ilegal di Jakarta dan Jawa Barat

Jakarta / Selasa (22/12/2020)



Menanggapi peredaran kosmetik yang begitu masif, Badan POM bekerja sama dengan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Bareskrim POLRI berhasil mengungkap kosmetik impor ilegal dan kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya yang bernilai lebih dari 10 miliar rupiah. Melalui konferensi pers Hasil Operasi Penindakan Kosmetik Impor Ilegal yang dilaksanakan secara daring melalui kanal *zoom meeting*, Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito mengungkap penyitaan kosmetik ilegal yang berlokasi di tiga titik TKP di daerah Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Bekasi.

Badan POM Serahkan Sertifikat CPOB kepada PT. Bio Farma untuk Sarana Produksi Vaksin COVID-19

Badan POM menyerahkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) kepada sarana produksi vaksin PT. Bio Farma di Bandung. Penyerahan sertifikat ini dilakukan saat kunjungan kerja ke PT. Bio Farma dalam rangka persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bersama Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito menyatakan bahwa Badan POM telah melakukan inspeksi dan proses verifikasi terhadap tahapan proses produksi dan penjaminan mutu di sarana produksi PT. Bio Farma. "Hasil evaluasi dan verifikasi menunjukkan bahwa sarana produksi telah memenuhi syarat sehingga sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dapat diterbitkan hari ini," ungkap Kepala Badan POM. Dengan penerbitan sertifikat CPOB ini, maka proses *fill and finish product* dapat segera dilakukan setelah bulk vaksin tiba.

Bandung / Rabu (30/12/2020)





BADAN POM

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

s.d. TRIWULAN IV TAHUN 2020

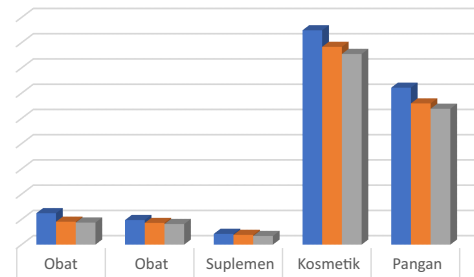
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan *pre-market*

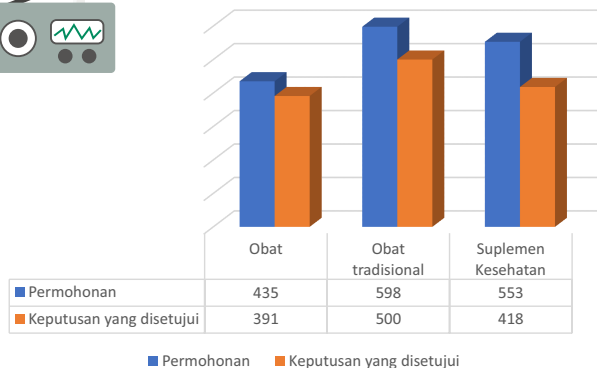
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.



Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, telah diterbitkan **155.862** keputusan dan **149.678** persetujuan izin edar dari **173.542** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Permohonan	12.447	9.747	4.262	84.911	62.175
Keputusan yang diterbitkan	9.075	8.605	3.871	78.363	55.948
Persetujuan	8.732	8.160	3.435	75.530	53.821



■ Permohonan ■ Keputusan yang disetujui

Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, dari 1.586 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 1.309 (82,53%) iklan.**

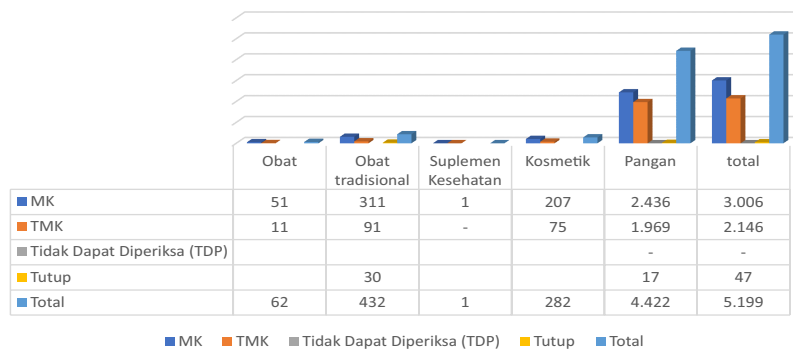
Pengawasan *post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

1

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

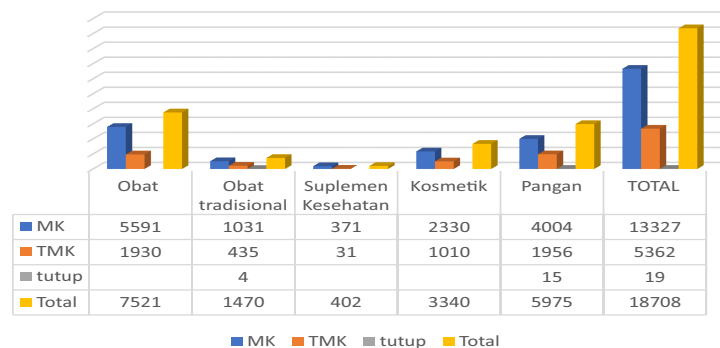


Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 telah diperiksa sebanyak **5.199 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **2.146 (41,28%)** sarana adalah TMK.

Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV tahun 2020

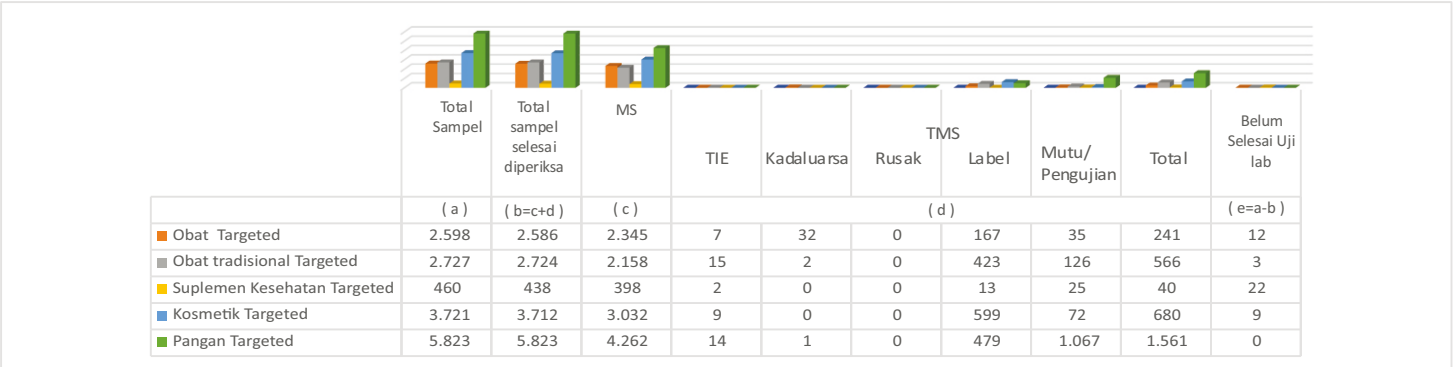
Keterangan:
MK = Memenuhi Ketentuan
TMK = Tidak Memenuhi

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 telah diperiksa **18.708 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **5.362 (28,66%)** sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV tahun 2020

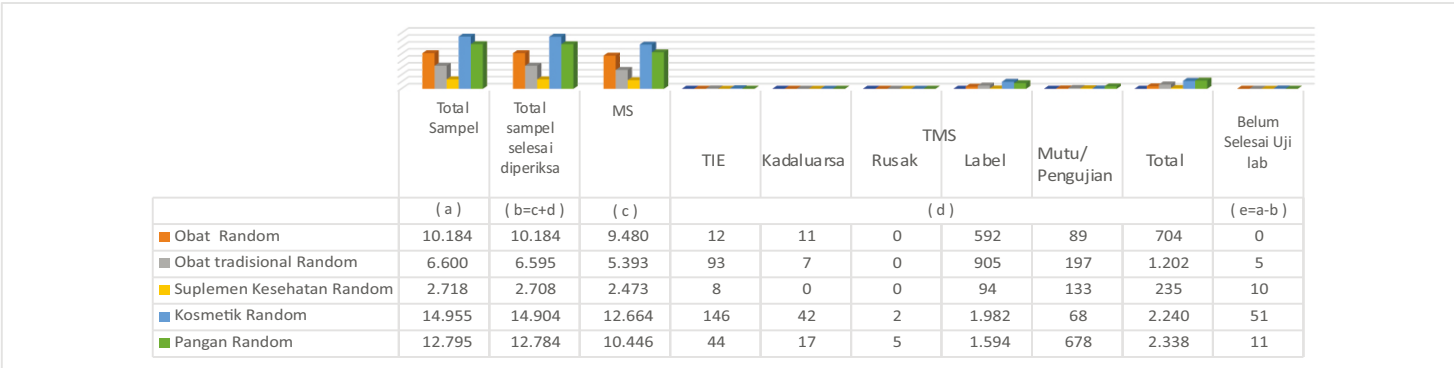
A. Targeted



Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) s.d. Triwulan IV tahun 2020

Sampai dengan **Triwulan IV tahun 2020**, dari **15.329 sampel targeted** yang disampling terdapat 15.283 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **3.088 (20,20%)** sampel tidak memenuhi syarat.

B. Random / Acak



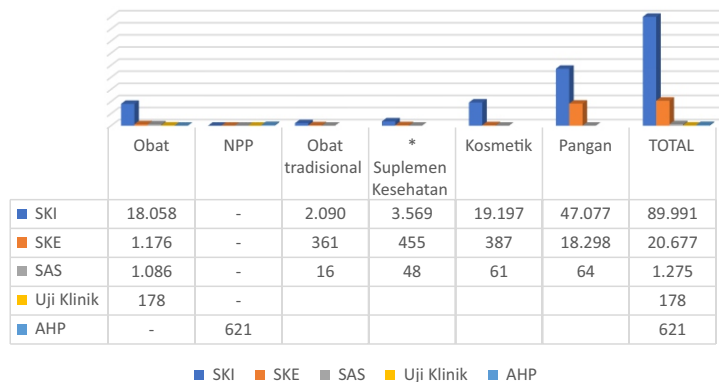
Gambar 6. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) s.d. Triwulan IV tahun 2020

Sampai dengan **Triwulan IV tahun 2020**, dari **47.252 sampel random** yang disampling terdapat 47.175 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **6.719 (14,24%)** sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa Izin Edar

* Sumber data Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan **Triwulan IV tahun 2020** telah diterbitkan **89.991 SKI**, **20.677 SKE**, **1.275 SAS**, **178 Uji Klinik**, dan **621 AHP** Obat dan Makanan.

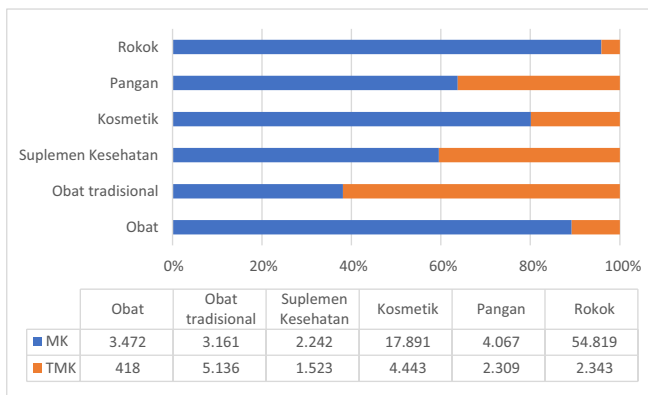


* Termasuk Kuasi

Gambar 7. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV tahun 2020

Pengawasan Iklan

4



Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. Sampai dengan **Triwulan IV tahun 2020**, dari **101.824** iklan Obat dan Makanan yang diawasi, **16.172 (15,88%)** iklan tidak memenuhi ketentuan.

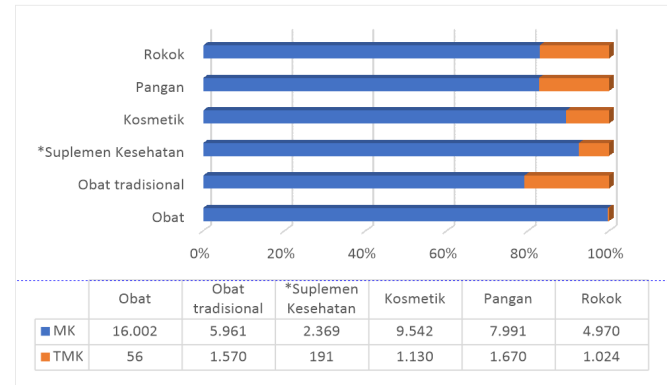
Gambar 8. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV tahun 2020



BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. **Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, dari 52.476 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 5.641 atau**

sekitar 10,75% label tidak memenuhi ketentuan.

* Termasuk Kuasi



Gambar 9. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan d. Triwulan IV tahun 2020

6

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.



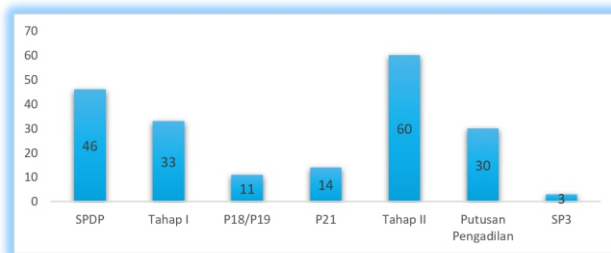
	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjut	%
Obat	6.113	4.692	76,75
Obat Tradisional	95	95	100,00
Suplemen Kesehatan	16	16	100,00
Kosmetik	395	351	88,86

Gambar 10. Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan IV tahun 2020

II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras disarana yang tidak berwenang, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

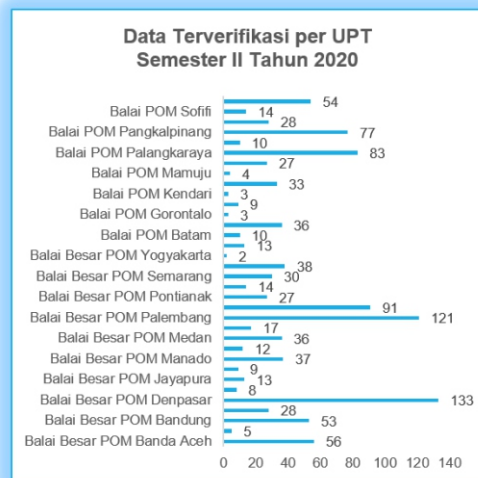
Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti perkara sebanyak 197 perkara, dengan rincian 46 perkara masih dalam tahap SPDP, 33 perkara pada Tahap I, 11 perkara pada tahap P18/19, 14 perkara pada tahap P21, 60 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap 2), dan 30 perkara yang sudah mendapatkan putusan pengadilan serta terdapat 3 perkara yang mendapatkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara.



Gambar 11. Perkembangan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari - Desember 2020)

Peta Rawan Kasus

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, BPOM menyusun peta berbasis aplikasi yang menggambarkan potensi atau kerawanan kasus Obat dan Makanan di setiap wilayah Indonesia berdasarkan data hasil pengawasan dan penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, hasil pemberian bantuan pengujian sampel dan/atau keterangan ahli kepada Penyidik Polri, hasil tukar menukar informasi dengan lintas sektor terkait, dan hasil monitoring terhadap isu-isu adanya wilayah rawan kasus obat dan makanan di seluruh Indonesia. Data yang dihasilkan peta rawan kasus bersifat aktual dan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya pada bidang penindakan agar lebih valid, terarah, dan terukur. Peta rawan kasus ini dapat diakses melalui URL: www.penindakan.pom.go.id/rawankasus. Adapun data yang telah dilakukan verifikasi sepanjang Semester II Tahun 2020 (1 Juli 2020 s.d 31 Desember 2020) adalah sebanyak 1135 data dengan rincian pada Gambar 12. disamping:



Gambar 12. Data Peta Rawan Kasus Yang Telah Diverifikasi

Peta rawan kasus skala nasional ditampilkan dalam bentuk zonasi berdasarkan komoditi yang dominan pada masing-masing provinsi dengan legend warna yang digunakan adalah Merah (Obat), Hijau (Obat Tradisional), Kuning (Kosmetika), Biru (Pangan Olahan), dan Cokelat (Suplemen Kesehatan). Berdasarkan Gambar di bawah dapat dilihat pada tingkat provinsi wilayah kerawanan didominasi oleh komoditi kosmetika, dengan rincian kerawanan wilayah untuk tiap komoditi sebagai berikut:

a. Obat

Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara

b. Obat Tradisional

Jawa Timur

c. Kosmetika

Aceh, Riau, Kep. Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan Lampung, Kep. Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

d. Pangan Olahan

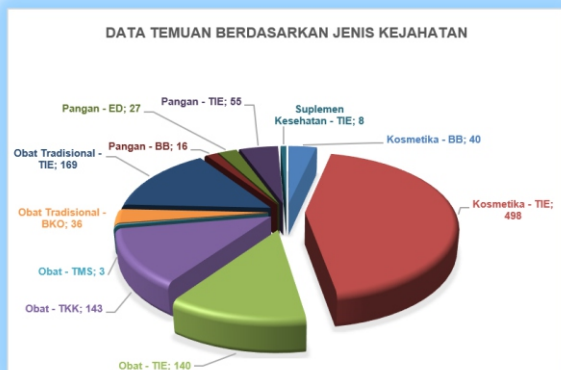
Kalimantan Utara.

e. Suplemen Kesehatan

Selain data kerawanan wilayah, pada peta rawan kasus juga dapat diperoleh data kasus dan potensi kerawanan kasus yang terjadi di seluruh Indonesia, sebagai berikut:



Gambar 13.
Peta Rawan Kasus Skala Nasional Semester II Tahun 2020

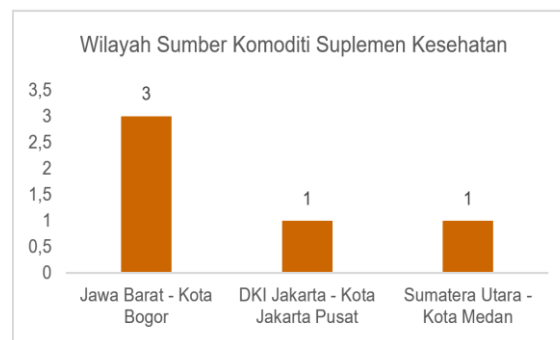
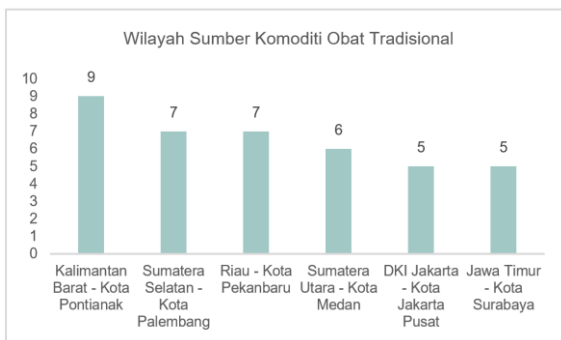
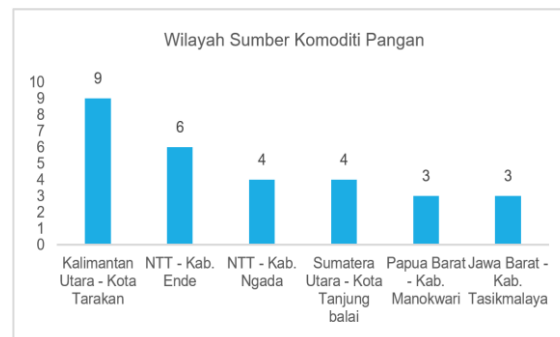
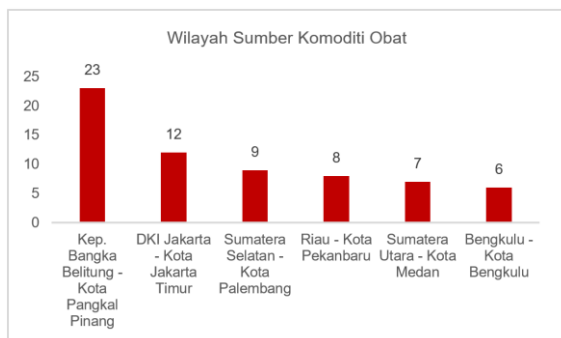
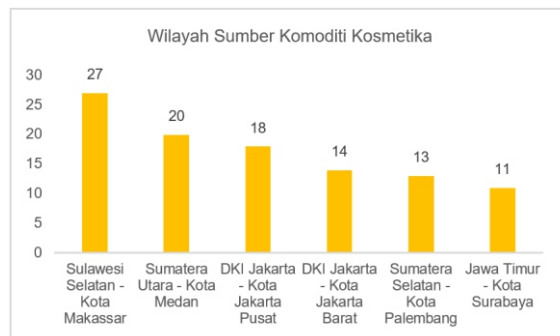


Gambar 14.
Data Jenis Kejahatan dan Kasus Semester II Tahun 2020

Dari Gambar di atas dapat dilihat data kasus yang mendominasi sampai dengan triwulan IV tahun 2020 adalah kasus kosmetika TIE (Tanpa Izin Edar) dengan jumlah kasus sebanyak 498, diikuti oleh kasus Obat Tradisional TIE (169 kasus), Obat TTK (143 kasus), dan Obat TIE (140 kasus). Data ini sesuai dengan data kerawanan wilayah yang ditampilkan pada **Gambar 13** dimana kosmetika merupakan komoditi yang mendominasi wilayah kerawanan pada skala nasional.

Data lain yang dapat tergambarkan dari peta rawan kasus adalah wilayah yang teridentifikasi sebagai sumber bagi wilayah lainnya per masing-masing komoditi. Data ini bisa dijadikan sebagai basis data wilayah yang dijadikan sumber dalam melakukan penindakan dan/atau pengawasan di lapangan. Berikut wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai wilayah sumber.

10 BESAR WILAYAH SUMBER	
Wilayah Sumber	Jumlah Temuan
DKI Jakarta	91
Sumatera Utara	58
Kep. Bangka Belitung	50
Sumatera Selatan	49
Jawa Timur	38
Sulawesi Selatan	38
Kalimantan Utara	30
Riau	29
Jawa Barat	23
Sumatera Barat	19



Gambar 15.
Grafik Wilayah Sumber Per Komoditi

III. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.



Obat

Telah disusun 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat yang beberapa diantaranya masih dalam progres. Berikut 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat tersebut:

1. Revisi Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat (100%).
2. Revisi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB (100%).
3. Revisi Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (100%).
4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (100%).
5. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10690 Tahun 2011 tentang Penerapan Farmakovigilans Bagi Industri Farmasi (100%)
6. Penyusunan Standar Obat Non Kompendial (100%).
7. Penyusunan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (Revisi) (100%).
8. Penyusunan Standar Mutu Produk Biologi (Revisi) (100%).
9. Informatorium Obat COVID-19 di Indonesia (100%).
10. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.11.20.1126 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Darurat (*Emergency Use Authorization*) (100%).
11. Revisi Peraturan BPOM No.33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan (85,71%).
12. Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label (42,86%).



Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Telah disusun 13 (tiga belas) peraturan/standar/pedoman obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, yang beberapa diantaranya masih dalam progress. Berikut 13 (tiga belas) peraturan/standar/pedoman tersebut:

1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Toksisitas Non Klinik Secara In Vivo (Revisi Lampiran Peraturan Kepala Badan POM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas Non Klinik Secara In Vivo) (100%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Persyaratan Teknis CPOTB (Revisi Lampiran Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis CPOTB) (100%).
3. Rancangan Peraturan badan POM tentang Pola Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (100%).
4. Pedoman Clustering Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (100%).
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) (100%).

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Klaim Kosmetika (100%).
7. Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Vitamin D 1000 IU sebagai Suplemen Kesehatan (100%).
8. Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Bentuk Sediaan Kosmetika (100%).
9. Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan dan Pengawasan Melatonin Sebagai Suplemen Kesehatan untuk Keperluan Khusus (100%).
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika (100%).
11. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.06.42.0255 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Alpha Hydroxy Acis (AHA) dalam Kosmetik (100%).
12. Keputusan Kepala Badan POM tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetika dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia (90%).
13. Pedoman Uji Klinik Obat Herbal (90%).

Target jumlah kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kajian, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kajian di bidang Obat Tradisional, 30 (tiga puluh) kajian di bidang suplemen kesehatan dan 10 (sepuluh) kajian di bidang Kosmetik. Pada Triwulan IV ini telah diselesaikan sebanyak 111 kajian yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) kajian di bidang Obat Tradisional, 33 (tiga puluh tiga) kajian di bidang Suplemen Kesehatan dan 15 (lima belas) kajian di bidang Kosmetik. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permohonan yang masuk. Jumlah kajian yang telah terselesaikan melebihi dari target karena pada masa pandemi saat ini kajian dilakukan secara daring, pembiayaan menjadi lebih sedikit, waktu pembahasan dengan narasumber menjadi lebih mudah dan fleksible sehingga kajian lebih cepat terselesaikan.



Pangan

Telah disusun 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman pangan olahan, yang beberapa di antaranya masih dalam progress. Berikut 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman tersebut:

1. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (100%)
2. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi pada Pangan Olahan (100%)
3. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pangan Steril Komersial (Pangan Berasam Rendah) (100%)
4. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim Label dan Iklan Pangan Olahan (100%)
5. Rancangan Revisi Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai gizi pada Label Pangan Olahan (untuk ING UMK dan takaran saji kurang dari ½ saji atau berat bersih kecil) (100%)
6. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (100%)
7. Pedoman Pelabelan Pangan: Umum (100%)

8. Pedoman Bahan Baku (100%)
9. Pedoman Akrilamida (100%)
10. Pedoman Implementasi Peraturan Kemasan Pangan (100%)

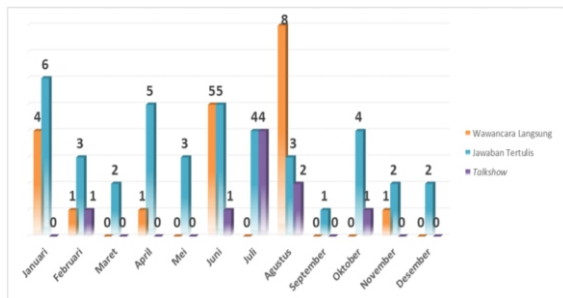
Target jumlah kajian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 adalah sebanyak 200 (dua ratus) kajian. Pada Triwulan IV ini telah diselesaikan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari stakeholder.

IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

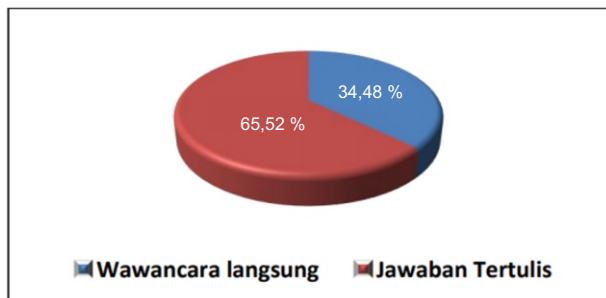
Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2020 terdapat 7 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM antara lain:

1. Kajian Peredaran Obat-Obatan yang sering disalahgunakan (100%)
2. Pengukuran IKU BPOM 2020 (100%)
3. Kajian Keamanan Pangan (INARAC) (100%)
4. Survey Persepsi Lintas Sektor terhadap Program Keamanan Pangan Nasional (100%)
5. Riset Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Proses Registrasi Pangan Olahan (100%)
6. Kajian Peningkatan Efektifitas Implementasi CPOTB bertahap oleh UMKM OT (100%)
7. Kajian Implementasi Inpres no.3 tahun 2017 dalam pengawasan Obat dan Makanan (100%)

V. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

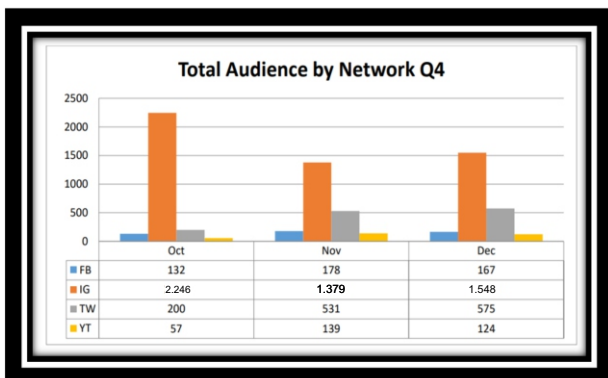


Gambar 16. Grafik Pemberian Pelayanan Informasi Kepada Media Periode Januari - Desember 2020

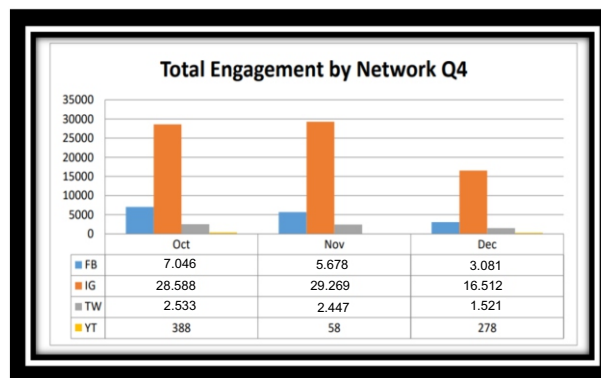


Gambar 17. Persentase Pelaksanaan Wawancara Langsung dan Jawaban Tertulis Kepada Media Periode Januari – Desember 2020

Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui website resmi Badan POM dan disebarkan kepada media massa. Tercatat 201 (dua ratus satu) berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM sepanjang tahun 2020. Adapun peliputan kegiatan Badan POM yang telah dilakukan adalah sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kegiatan, baik yang terselenggara di kantor Badan POM maupun di dalam kota dan di luar kota.



Gambar 18. Pertumbuhan *Audience* Media Sosial Badan POM Triwulan IV Tahun 2020



Gambar 19. Total *Engagement* Media Sosial Badan POM Triwulan IV Tahun 2020

Sementara itu, pertumbuhan audience pada triwulan IV terhadap 4 platform media sosial terpantau fluktuatif. *Instagram* merupakan platform dengan total audience tertinggi di triwulan IV ini dengan jumlah audience sebanyak 5.173. Selanjutnya *Twitter* 1.306, *Youtube* 622, dan *Facebook* sebesar 477. Pada triwulan IV, engagement pada setiap platform fluktuatif. Engagement tertinggi terjadi pada bulan Oktober, dengan jumlah 38.555, diikuti bulan November sebesar 37.452, dan Desember sebesar 21.392. Pertumbuhan jumlah engagement cenderung menurun di 4 platform tersebut.

Terkait publikasi hingga triwulan IV tahun 2020, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan *Youtube* mencapai 1.600 post. Platform *Twitter* adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 991 tweets dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah *Instagram* dengan 381 post, dengan *Facebook* sebanyak 195 post serta *Youtube* sebanyak 33 video.



Sementara untuk platform *Instagram*, top engagement content terdapat pada konten *Farmakope Indonesia Edisi IV* dengan total engagement sebesar 5.083.



Gambar 20. Top *Engagement Content* pada Platform *Facebook* Triwulan IV Tahun 2020



Gambar 21. Top *Engagement Content* pada *Instagram* Triwulan IV Tahun 2020

Pada platform *Twitter*, top engagement content terdapat pada tweet “Farmakope Indonesia Edisi IV” yang mampu meraih reaction sebesar 75.

Untuk *platform* Youtube, konten yang paling banyak dilihat adalah konten Talkshow Webinar “Generasi Milenial, Tingkatkan Kesehatan dengan Sadar Pangan Aman, Aksi Kita adalah Masa Depan Kita” dengan *engagement* sebesar 149.

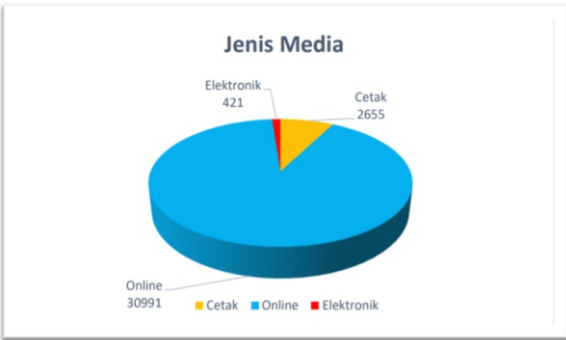
Terkait monitoring pemberitaan, hingga triwulan IV pada tahun 2020 terdapat 34.067 pemberitaan terkait Badan POM. Pemberitaan tersebut terdiri dari pemberitaan umum terkait Obat dan Makanan serta terkait Badan POM secara khusus. Dari 34.067 pemberitaan tersebut, distribusi sentimen berita mengenai Badan POM didominasi oleh pemberitaan bertonasi netral, yaitu sebanyak 23.035 berita (67,62%), diikuti dengan pemberitaan bertonasi positif sebanyak 10.976 berita (32,22%) dan 56 berita (0,16%) bertonasi negatif.

Dilihat dari tonasi pemberitaan terkait Badan POM, pemberitaan didominasi oleh pemberitaan netral dan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Badan POM dipandang cukup baik, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tren Pemberitaan Badan terkait dukungan Badan POM dalam penanganan COVID-19 turut memberikan andil besar dalam stabilnya tonasi pemberitaan terkait Badan POM. Terutama pemberitaan terkait pengawalan vaksin COVID-19 yang aman, berkhasiat dan bermutu serta dukungan lain dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemberitaan terkait Badan POM dari awal tahun cenderung menunjukkan tren kenaikan setiap bulannya. Tren menanjak cukup signifikan terjadi dari awal tahun hingga bulan Agustus, namun tren tersebut menurun pada bulan September. Pada bulan Oktober kembali terjadi kenaikan jumlah berita yang menjadikan bulan Oktober sebagai puncak pemberitaan di tahun 2020 dengan total pemberitaan sebanyak 4.782 berita. Salah satu yang menyebabkan bulan Oktober menjadi peak tertinggi adalah pemberitaan terkait uji klinik tahap-3 vaksin COVID-19 Sinovac, pemberitaan kunjungan Badan POM ke sarana produksi Sinovac di Tiongkok, serta pemberitaan terkait izin penggunaan darurat Favipiravir dan Remdesivir sebagai obat COVID-19.

Berdasarkan jenis medianya, pemberitaan terkait Badan POM didominasi oleh pemberitaan melalui media online, yaitu sebanyak 30.991 berita (90,97%), selanjutnya diikuti 2.655 berita (7,79 %) melalui media cetak dan 421 berita (1,24 %) melalui media elektronik.

Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total
Januari	340	832	3	1.073
Februari	557	662	9	1.165
Maret	399	1.202	3	1.340
April	747	1.032	2	1.781
Mei	890	1.217	8	2.115
Juni	1.047	1.649	3	2.699
Juli	452	2.434	1	2.887
Agustus	1.239	3.344	1	4.584
September	934	1.958	12	2.904
Oktober	1.876	2.894	12	4.782
November	1.280	3.129	3	4.412
Desember	1.214	3.111	0	4.325

Gambar 22. Tonalitas Pemberitaan tentang Badan POM Periode Januari – Desember 2020



Gambar 23. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Periode Januari – Desember 2020

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2020



VI. Digitalisasi Pelayanan Publik

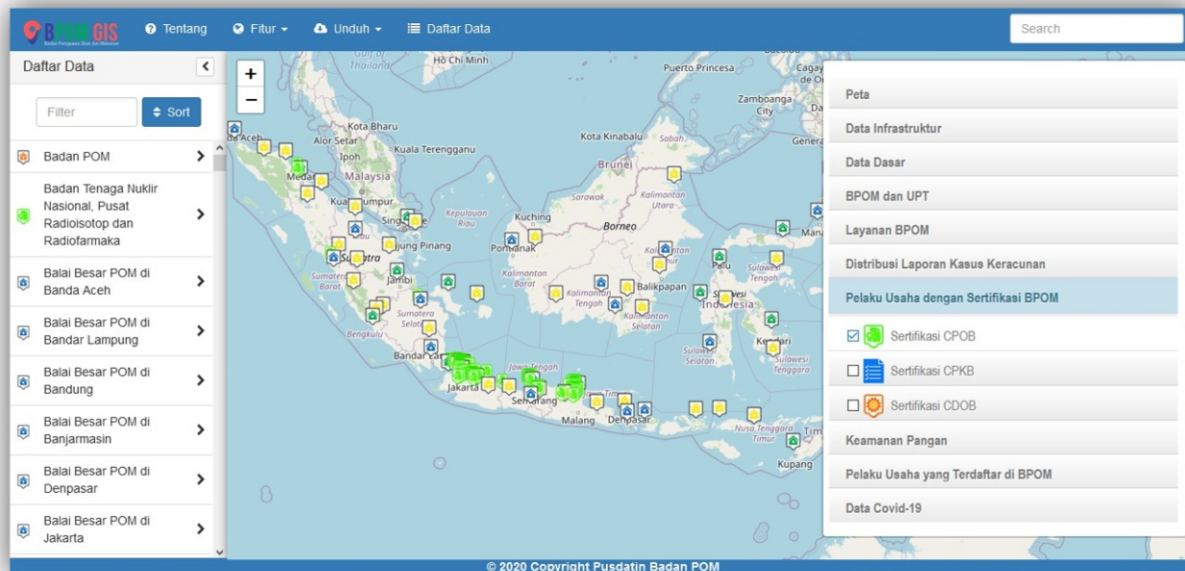
a. Integrasi Pelayanan Pre-Market

Pengembangan Integrasi SISPOM Pre Market meliputi aplikasi New Aero, Notifkos, Asrot, E-Reg Pangan. Uji coba Sistem Informasi Pre-Market Terintegrasi dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis komoditi yang dapat diakses melalui url: bpomfe.dev.pom.go.id oleh tim dari unit teknis yang membantu melakukan uji coba selama masa pelaksanaan, saat ini sudah melakukan uji coba eksternal. Kegiatan pengembangan Sistem Informasi *Pre-Market* Terintegrasi meliputi :

- 1) Analisa Kebutuhan
- 2) Desain Flow
- 3) Tahapan Konfirmasi
- 4) Tahapan Development
- 5) Tahapan Ujicoba Aplikasi
- 6) Tahapan Migrasi Data



Pengembangan Data dan Informasi Badan POM Operational Center (d.h. Badan POM Command Center) BPOM Command Center (BCC) telah berubah nama menjadi **BPOM Operational Center (BOC)**, namun masih mempertahankan tugas dan fungsinya. Pengembangan data dan Informasi strategis pada dashboard BOC pun tetap dilakukan secara berkesinambungan. Hingga Triwulan IV, telah dikembangkan 18 dashboard Informasi pada BOC. Pada Triwulan IV telah dilakukan pengembangan Dashboard BOC untuk monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja unit teknis Pusat (21 dashboard) dan Balai (12 dashboard) beserta input engine data. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan unit teknis dan balai tidak lagi harus mengirimkan data laporan kinerja berupa hard copy, namun secara terpusat dan digital melalui aplikasi BOC.



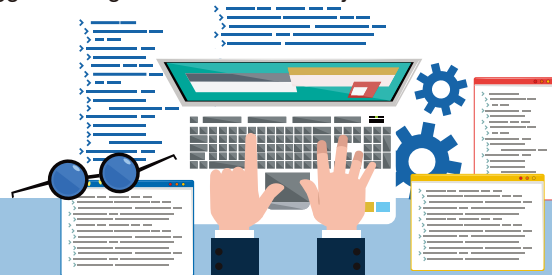
Dashboard BOC juga diperkaya dengan pengembangan sistem analisis data pengawasan yang disebut dengan WebGIS Badan POM, yaitu sebuah sistem yang memuat informasi geografis, divisualisasikan dalam bentuk peta, sebaran wilayah, titik, dan garis. Visualisasi dan muatan data pada WebGIS terus dikembangkan dan diperkaya secara berkesinambungan. Data yang diintegrasikan ke WebGIS berasal dari data pada aplikasi di Badan POM.

Data yang sudah tersedia pada WebGIS hingga TW IV antara lain: 1). Data Kepegawaian, 2). Data pengaduan, 3). Data e-sertifikasi, 4). Data sertifikasi CDOB, 5). Data pelaporan kasus keracunan, 6). Data Gerakan keamanan pangan desa, 7). Data Sebaran Balai Besar/Balai POM, 8). Data hasil pengujian lab penanggulangan COVID-19 BPOM, 9). Data sebaran UMKM pangan olahan terdaftar, 10). Data sebaran UMKM Kosmetik olahan terdaftar, 11). Data Keamanan Pangan, 12). Data sebaran wilayah pandemi covid, 13). Data sebaran fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Pemanfaatan Data Lake untuk pengembangan dashboard Informasi terintegrasi pada BOC telah berproses pada triwulan IV ini, yaitu dengan mengembangkan visualisasi dashboard melalui tableau dengan bersumber dari data lake. Selain itu, pembahasan terkait Satu Data Badan POM melalui analisis dan pemetaan data strategis sesuai Proses Bisnis Badan POM telah dilakukan sebagai persiapan untuk membangun Satu Data Badan POM yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2021.

c. Pengembangan Aplikasi Peta Penindakan

Aplikasi ini merupakan kumpulan hasil dari kegiatan pengamanan obat dan makanan yang dilakukan oleh Kedeputusan 4. Selain sebagai *database* kegiatan Deputi 4 aplikasi berfungsi memberikan informasi terkait pengamanan obat dan makanan.

Pada tahun 2020 ini dilakukan pengembangan kembali pada penyempurnaan modul Peta Rawan kasus dan modul Pelaporan Intelijen. Pada modul Peta Rawan Kasus berfokus pada mempermudah mengambil informasi dari data yang dikumpulkan oleh Dit. Pengamanan dan Balai. Pada modul Pelaporan Intelijen difokuskan pada mengakomodir pelaporan intelijen di pusat, balai dan loka. Saat ini pengembangan penyempurnaan modul Peta Rawan Kasus sudah melakukan UAT pada tanggal 30 Juli 2020, sedangkan modul Pelaporan Intelijen sudah melakukan UAT pada tanggal 30 September 2020. Pada saat ini modul Rawan Kasus sudah digunakan oleh Dit. Pengamanan, Balai, dan Loka, sedangkan masih menunggu bimbingan teknis dari Dit. Intelijen ke Balai dan Loka.



VII. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, telah ditetapkan 32 (tiga puluh dua) Peraturan Badan POM, 145 (seratus empat puluh lima) Keputusan Kepala Badan POM, 91 (sembilan puluh satu) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.



1 Judul RUU

Rancangan Undang-Undang:
Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.



3 Judul RPP

Rancangan Peraturan Pemerintah:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan

32 Judul Peraturan Badan POM



1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Subbidnag Pengawasan Obat Dan Makanan Terpadu
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Bpom
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 tahun 2020 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi Dan Makanan
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2020 Tentang Manajemen Kinerja ASN dilingkungan Badan POM
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 tahun 2020 Tentang Registrasi Suplemen Kesehatan
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 tahun 2020 Tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa
14. Peraturan Badan POM Nomor 14 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom No 29 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom No 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia
16. Peraturan Badan POM Nomor 16 tahun 2020 Tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan Yang Di Produksi Oleh Usaha Mikro Dan Usaha Kecil
17. Peraturan Badan POM Nomor 17 tahun 2020 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia
19. Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Obat
20. Peraturan Badan POM Nomor 20 tahun 2020 Tentang Perubahan atas perbpom no 28 tahun 2019 tentang bahan penolong dalam pengolahan pangan
21. Peraturan Badan Pom Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan
22. Peraturan Badan Pom Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

32 Judul Peraturan Badan POM



23. Peraturan Badan Pom Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat Dan Makanan
24. Peraturan Badan Pom Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Badan Pom Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus
25. Peraturan Badan Pom Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Pangan Steril Komersial Yang Disterilisasi Setelah Dikemas
26. Peraturan Badan Pom Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor Dan Eksor Narkotika , Psikotropika Dan Prekursor Farmasi
27. Peraturan Badan Pom Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat
28. Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
29. Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
30. Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika
31. Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik
32. Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM No 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring

VIII. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi birokarasi

Penataan Organisasi Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi

a. Sosialisasi Organisasi dan Tata Kerja BPOM Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden RI periode tahun 2019-2024. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah menetapkan dan melakukan sosialisasi 3 (tiga) Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPOM terdiri atas:

- a. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1002);
- b. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1003)
- c. Peraturan BPOM Nomor 23 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1004).

Selain itu telah ditetapkan Keputusan Kepala BPOM sebagai berikut:

- a. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM;
- b. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 tentang Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan BPOM;
- c. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1151 tentang Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.



Gambar 24. Sosialisasi Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM 2020 tanggal 23 November 2020

b. Pelantikan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional di lingkungan BPOM

Sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, BPOM telah melakukan pemetaan jabatan administrasi Eselon III (administrator) dan eselon IV (pengawas) yang dialihkan ke jabatan fungsional dan jabatan yang tidak dialihkan ke jabatan fungsional.

Berdasarkan hasil penyederhanaan birokrasi BPOM, terdapat 83,31% pejabat administrasi yang dilakukan penyetaraan dan pengalihan ke dalam jabatan fungsional terdiri atas 80,10% jabatan administrator (eselon III) yang dialihkan ke jabatan fungsional dan 84,77% jabatan pengawas (eselon IV) yang dialihkan ke jabatan fungsional. Rekapitulasi penyederhanaan birokrasi BPOM sebagai berikut:

No	Jabatan Struktural	Struktur Organisasi Existing	Struktur Organisasi Baru Yang Dipertahankan	Pejabat Administrasi Dialihkan ke Fungsional
1	Administrator (Eselon III)	201	40 (19,90%)	161 JF Ahli Madya (80,10%)
2	Pengawas (Eselon IV)	440	67 (15,23%)	373 JF Ahli Muda (84,77%)
Total		641	107 (16,69%)	534 (83,31%)

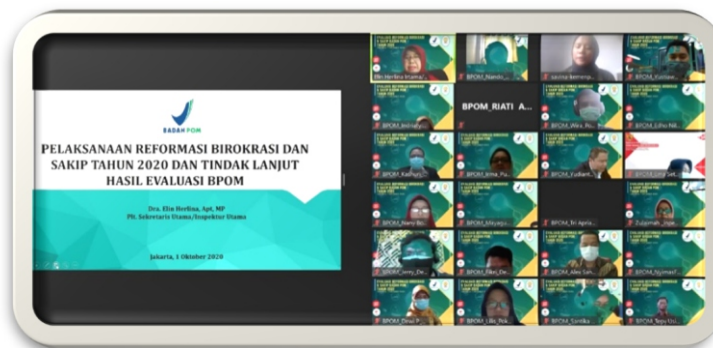
Menindaklanjuti penyederhaan birokrasi yang dilakukan BPOM, pada tanggal 28 Desember 2020 dilakukan pelantikan sebanyak 475 pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional.



Gambar 25. Pelantikan 475 Pejabat Fungsional Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi tanggal 28 Desember 2020 secara luring dan daring

Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) BPOM telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB melalui *video conference* dan diikuti Tim Pelaksana RB Badan POM Pusat dan Tim RB Eselon I. Evaluasi RB BPOM meliputi 8 (delapan) Area Perubahan RB BPOM dan evaluasi RB Unit Kerja Eselon I di lingkungan BPOM. Pada saat evaluasi disampaikan paparan mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2020 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi RB Tahun 2019, BPOM memperoleh Indeks RB BPOM 80,12 kategori “A” dan evaluasi AKIP dengan perolehan nilai AKIP BPOM 78,60 kategori “BB”. Indeks RB dan Nilai AKIP BPOM Tahun 2020 ditargetkan 81,00 (kategori “A”).



Gambar 26. Evaluasi RB BPOM Tahun 2020

Pelaksanaan Audit Surveilans dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 BPOM

a. Audit Surveilans untuk 64 (enam puluh empat) Unit Organisasi dan Sertifikasi Stage 2 untuk 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti kegiatan *entry meeting* pelaksanaan audit surveilans dan sertifikasi QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 6 Agustus 2020, berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-OT.02.2.22.08.20.431 tanggal 6 Agustus perihal Pelaksanaan Audit Surveilans dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 dilaksanakan audit surveilans untuk 64 (enam puluh empat) Unit organisasi dan audit sertifikasi stage 2 untuk 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota.



Gambar 27. Pelaksanaan Audit Surveilans pada Manajemen Puncak BPOM pada tanggal 19 Oktober 2020 dan Audit Sertifikasi Stage 2 QMS ISO 9001:2015 di Loka POM Banggai tanggal 2 November 2020

b. Exit Meeting Audit Surveilans untuk 64 (enam puluh empat) Unit Organisasi dan Sertifikasi Stage 2 untuk 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota

Kegiatan exit meeting ISO 9001:2015 merupakan pertemuan penutup pelaksanaan audit Surveilans dan Sertifikasi ISO 9001:2015 tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 yang dihadiri oleh Deputi Manajemen Puncak BPOM seluruh Kepala Unit Kerja serta Perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja BPOM secara daring. Pada pertemuan exit meeting, Penyedia jasa konsultansi ISO 9001:2015 dari PT TUV Rheinland Indonesia menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan audit Surveilans dan Sertifikasi ISO 9001:2015 Tahun 2020 dengan perolehan surat rekomendasi mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 untuk 64 (enam puluh empat) yang terdiri atas 1 (satu) Manajemen Puncak BPOM, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, dan 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM dan serta sertifikat ISO 9001:2015 untuk 19 (sembilan belas) UPT Loka POM.



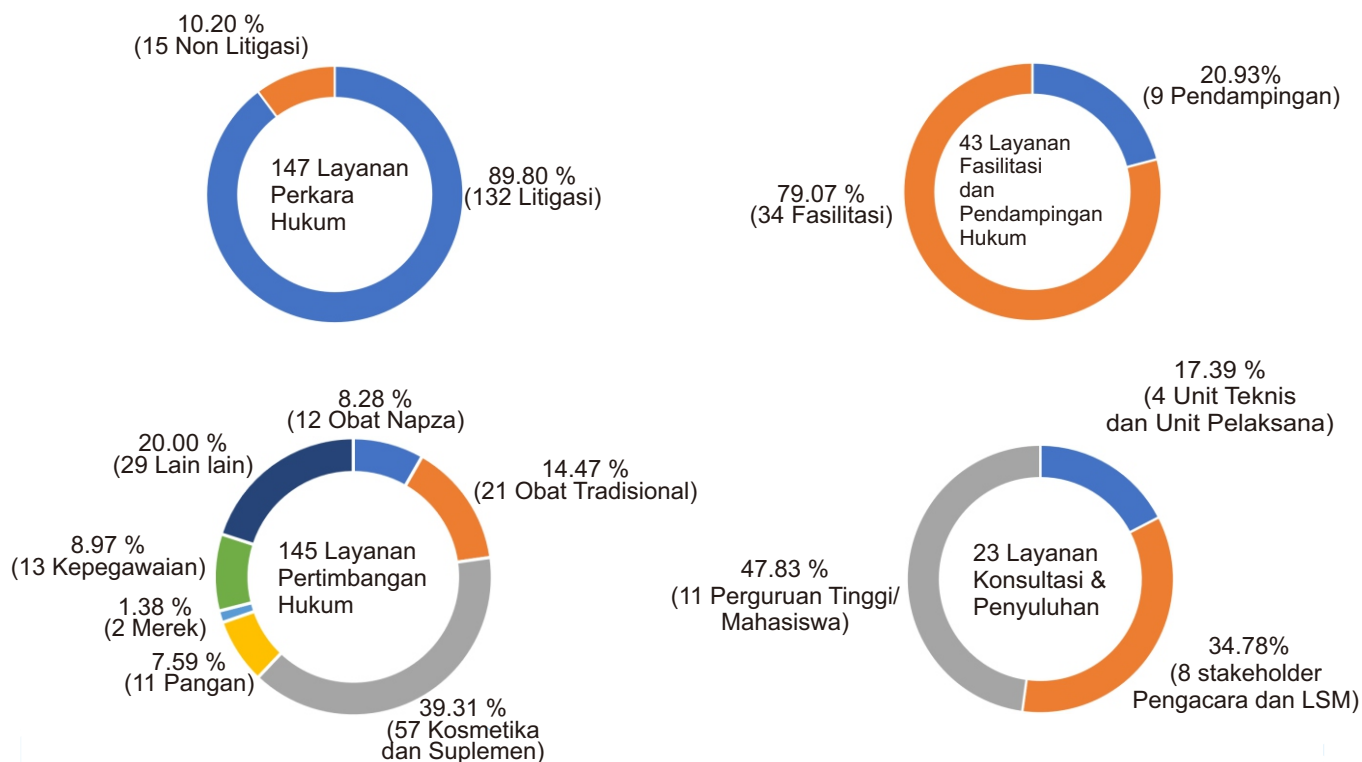
Gambar 28. Pelaksanaan Exit Meeting Audit Surveilans dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 BPOM pada tanggal 10 November 2020

IX. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 358 layanan yang terdiri dari :



X. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Kerjasama yang dilakukan BPOM sampai dengan Triwulan IV 2020, adalah:

1. Virtual Workshop OKI diselenggarakan pada tanggal **9-10 Desember 2020** dengan tema **“Enhancing Collaboration in Research, Manufacturing, Management of Medicines and Vaccines in The OIC Member States”**. Workshop terdiri dari 4 (empat) *segment* dengan topik *Research and Development (Clinical Trial)*, *Manufacturing (Manufacturers Readiness for up-stream and down-stream)*, *Distribution and Storage (Good Distribution Practice/GDP)*, dan *Post Market Surveillance (Quality and Pharmacovigilance)*. Workshop menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai negara seperti Indonesia, Turki, Nigeria, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Malaysia, Brunei Darussalam, serta dari organisasi OKI seperti COMSTECH dan SMIIC.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 235 peserta secara daring dan luring oleh *stakeholder* nasional baik dari K/L terkait (Kemlu, Kemenkes, Kemenristek/BRIN, Lembaga Riset Eijkman, Industri Farmasi Nasional serta *stakeholder internasional* yaitu NMRAs OKI, Industri Obat dan Vaksin, Lembaga Riset dan Akademisi dari 23 Negara-Negara OKI dan Organisasi Internasional seperti WHO serta Institusi OKI (COMSTECH, SMIIC dan SESRIC).

Kegiatan dibuka oleh **Ibu Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP.**, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi dan kerja sama dalam memerangi pandemi COVID-19. NMRAs OKI telah memiliki dua dokumen strategis namun praktis yaitu Deklarasi Jakarta dan *Plan of Action* yang merupakan hasil penting dari *First Meeting of the OIC NMRAs* tahun 2018. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari implementasi kedua dokumen dimaksud dan upaya untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi agar dapat negara OKI dapat memiliki akses yang sama terhadap obat dan vaksin.

Pada pembukaan kegiatan tersebut juga hadir Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, *Assistant Secretary General (ASG) for Science & Technology Affairs*, *Ambassador Askar Mussinov*, serta 6 (enam) *Head of NMRAs* yaitu Bangladesh, Comores, Pakistan, Arab Saudi, Turki dan Uni Emirat Arab.

2. Virtual Training Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Badan POM untuk Palestina Tahun 2020 **“Indonesian FDA's Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority”** Badan POM meneguhkan komitmen untuk kembali memberikan bantuan peningkatan kapasitas regulator Obat dan Makanan Palestina melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dengan menyelenggarakan kegiatan *Virtual Training* yang bertema **“Indonesian FDA's Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority”**.

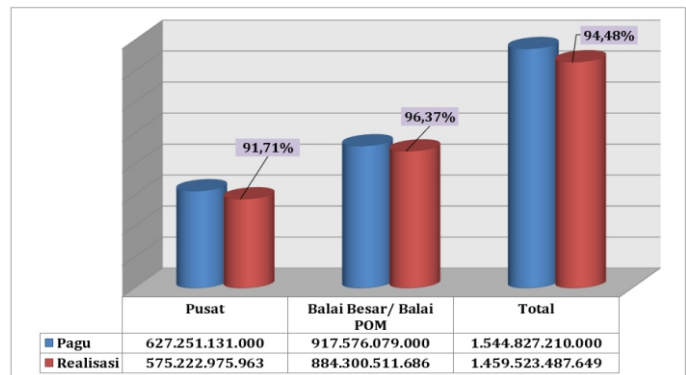
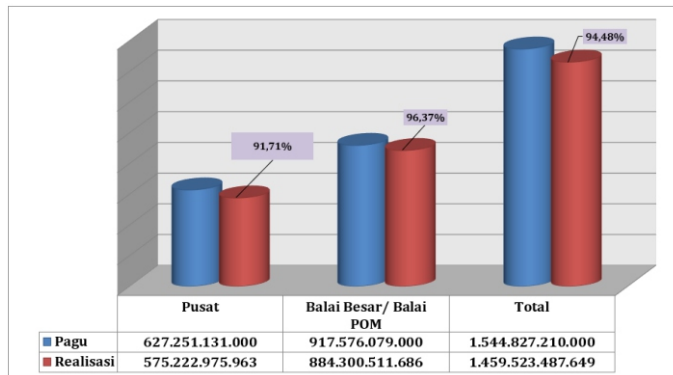
Pada tanggal 23-25 November 2020 yang dibuka oleh Kepala Badan POM dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Palestina, dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI. Kegiatan ini merupakan bantuan nyata Badan POM untuk Palestina yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan selama 2 (dua) tahun berturut – turut sejak tahun 2018. Program KSS Badan POM 2020 bertujuan untuk mendukung persiapan Pemerintah Palestina dalam membentuk Otoritas Regulator Obat dan Makanan Palestina yang independent dengan memfokuskan pada peningkatan kapasitas fungsi regulatori di bidang pengawasan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan makanan untuk peningkatan kompetensi regulator obat dan makanan di Palestina. Pelatihan secara virtual (*virtual training*) ini dilaksanakan secara paralel yang terdiri dari pelatihan dengan topik di bidang obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan serta pengujian (laboratorium).



- Pertemuan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Turki terkait Penanganan COVID-19 pada 27 Desember 2020. Pertemuan antara Kepala Badan POM dan Tim bertemu dengan Prof. Tefyik Demir (*Government Chief Adviser on COVID-19 Vaccine Program*), *President of Turkish Medicine and Medical Devices Agency (TMMDA)* beserta jajarannya, *Head of International Relation and EU Relations of the Ministry of Health*, dan *Chief of Turkish National COVID-19 Vaccines Program*, bertujuan untuk membahas Perkembangan Hasil Uji Klinik Vaksin COVID-19 Sinovac baik di Indonesia maupun Turki. Kedua belah pihak menyampaikan perkembangan terkini kasus COVID-19 dimasing-masing negara dan sepakat untuk saling menyampaikan informasi data hasil Uji Klinik vaksin dimaksud. Hasil pertemaun tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan Badan POM dalam menerbitkan *Emergency Use Authorization* untuk Vaksin Sinovac.

XI. Pengelolaan Anggaran

Setelah dilakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, total anggaran BPOM Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.544.827.210.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran tersebut terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 10 Satker Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM. Realisasi anggaran Triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp1.459.523.487.649,- (94,48%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 10 Satker Pusat Rp575.222.975.963,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp884.300.511.686,-



XII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2020. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2020-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020

Capaian Rencana Kinerja BPOM s.d Triwulan IV 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	82,00	indeks	85,72	104,54
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional	74,00	indeks	79,16	106,97
		Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	81,00	indeks	81,81	101,00
		Indeks Pengawasan Kosmetik	74,00	indeks	85,48	115,51
		Indeks Pengawasan Makanan	77,00	indeks	81,04	105,25
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64,00	%	45,00	70,31
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	80,80	%	87,09	107,79
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	78,00	%	81,64	104,67
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	85,00	%	83,45	98,18
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	72,00	%	73,19	101,66
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	72,00	Nilai	75,69	105,13
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83,00	Nilai	88,30	106,39
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	71,00	Nilai	70,57	99,39
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	87,20	Nilai	88,33	101,30
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	87,00	%	84,43	97,05

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	55,00	%	54,16	98,47
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	85,00	%	88,06	103,60
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	52,00	%	52,07	100,13
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	60,00	%	66,58	110,97
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3,51	nilai indeks	3,99	113,68
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	71,00	nilai	92,50	130,28
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	506,00	Sekolah	510,00	100,79
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	158,00	desa	158,00	100,00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	66,00	pasar	65,60	99,39
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00	%	93,83	114,43
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00	%	94,43	125,91
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	65,00	%	83,69	128,75
		Indeks RB UPT	81,00	nilai indeks	76,26	94,15
		Nilai AKIP UPT	81,00	Nilai	77,24	95,36
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	nilai indeks	82,92	110,56
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,00	%	69,32	91,21

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	70,00	%	62,32	89,03
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	nilai indeks	1,76	116,56
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00	Nilai	91,14	98,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (92%)	%	100,00	108,70
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60,00	%	65,00	108,33
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80,00	%	83,33	104,17
		Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	33,00	%	33,33	101,01
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83,00	%	82,23	99,07
		Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50,00	%	55,56	111,11
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	60,00	%	60,00	100,00
		Indeks RB Direktorat Pengamanan	85,00	nilai indeks	74,77	87,96
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	81,00	nilai indeks	85,31	105,32
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengamanan yang optimal	1,51	nilai indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	Efisien (88%)	%	75,00	85,23
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75,00	%	95,45	127,27
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	75,00	%	76,69	102,25
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	75,00	%	86,36	115,15
		Persentase hasil patroli siber yang efektif	55,00	%	65,74	119,53
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2,00	jaringan	2,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85,00	nilai indeks	79,73	93,80
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	75,00	nilai indeks	82,60	110,13
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	1,51	nilai indeks	1,00	66,23
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	Efisien (88%)	%	100,00	113,64
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	77,00	%	77,36	100,47
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	83,30	%	83,33	100,04
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	62,00	%	44,79	72,25
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh Balai/ Balai Besar POM	80,00	%	98,63	123,29
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86,00	nilai indeks	86,07	100,08
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	73,00	%	74,80	102,46
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	72,00	%	72,13	100,17
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92,00	%	100,00	108,70
		Jumlah UMKM Obat Tradisional yang difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	90,00	Jumlah	100	111,11
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	60,00	%	64,29	107,14
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88,00	%	96,16	109,27
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3,11	nilai indeks	4,24	136,33
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88,00	nilai indeks	83,83	95,26

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	83	%	37,78	45,35
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	62	%	42,31	68,24
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh Balai/ Balai Besar POM	80	%	91,78	114,73
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	73	%	73,99	101,36
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	72	%	59,91	83,21
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	100,00	108,70
		Jumlah UMKM Obat Tradisional yang difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	90	Jumlah	73	81,11
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	60	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88	%	94,90	107,84
		Indeks Pelayanan Publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3	nilai indeks	akhir tahun	akhir tahun

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efektifitas KIE di bidang OT dan SK	88,81	Nilai	91,36	102,87
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	75,00	nilai indeks	86,49	115,32
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal	1,51	nilai indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Efisien (99%)	%	100,00	101,01
1.5	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko	18,00	%	18,11	100,60
		Persentase toko modern yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	10,00	%	9,86	98,57
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	65,00	%	71,23	109,59
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	84,50	Indeks	89,40	105,80
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	3,11	Indeks	3,98	127,97
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang di selesaikan tepat waktu	80,00	%	100,00	125,00
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang diselesaikan sesuai standar	85,00	%	92,04	108,28
		Persentase Sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru	85,00	%	100,95	118,77
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	45,00	%	47,97	106,60
		Persentase insiden/kasus keamanan pangan yang ditindaklanjuti	85,00	%	90,00	105,88
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Diberikan	81,00	%	91,53	113,00
		Persentase UPT yang memahami sistem Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	40,00	%	43,84	109,59
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	85,00	Indeks	82,83	97,45

1	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	75,00	Indeks	85,38	113,84
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Optimal	1,51	Indeks	0,25	16,56
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang baik	Efisien (88%)	%	100,00	113,64
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	85,00	%	85,05	100,06
		Persentase UMKM Kosmetik yang Menerima Sertifikat CPKB	85,00	%	86,67	101,96
		Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	85,00	%	80,11	94,24
		Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	83,00	%	92,65	111,62
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	83,50	Indeks	83,63	100,16
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	85,00	%	77,29	90,92
		Persentase Hasil Pengawasan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku usaha/Stakeholder	81,00	%	79,51	98,16
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	88,00	%	88,86	100,98
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	80,00	%	85,71	107,14
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	90,00	%	97,53	108,36
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan kosmetik	3,51	Indeks	4,26	121,37
		Jumlah UMKM kosmetik yang di fasilitasi dalam pemenuhan CPKB	56,00	UMKM	66	117,86
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	85,00	Indeks	78,66	92,54
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	75,00	Indeks	80,53	107,37
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	Efisien (100%)	%	100,00	100,00

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	75,00	Indeks	85,38	113,84
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Optimal	1,51	Indeks	0,25	16,56
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang baik	Efisien (88%)	%	100,00	113,64
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	70,00	%	74,68	106,69
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Bidang Distribusi Obat	87,50	Indeks	88,01	100,58
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	80,00	%	85,24	106,55
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	65,00	%	76,28	117,35
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	78,00	%	84,33	108,12
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,51	Indeks	3,90	111,11
		Indek RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	90,00	Indeks	76,37	84,86
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	75,00	indeks	59,61	79,48
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Efisien (88%)	%	99,69	113,28
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP	84,50	Indeks	86,00	101,78
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	85,00	Indeks	85,30	100,35

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kepatuhan industri Produk Tembakau dalam iklan dan label	46,00	Indeks	45,13	98,11
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	16300,00	permohonan	18.550	113,80
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	70,00	%	97,76	139,66
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3,11	nilai indeks	4,33	139,23
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang obat	70,00	nilai	90,41	129,16
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70,00	%	76,75	109,65
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	86,00	%	63,79	74,18
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	50000,00	label dan iklan	59.789	119,58
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,00	nilai indeks	88,77	106,95
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	75,00	Indeks	77,74	103,65
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Efisien (98%)	%	99,97	102,01
1.9	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan	54,00	%	49,90	92,41
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pengawasan Pangan Olahan sesuai standar	38,00	Jumlah	39	102,63

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar	65,00	%	69,70	107,23
		Persentase sarana produksi dan distribusi pangan olahan risiko rendah dan sedang yang dilakukan pendalam mutu, dan memenuhi ketentuan	50,00	%	48,04	96,09
		Persentase sampel pangan fortifikasi yang diambil dan memenuhi syarat	87,00	%	87,06	100,07
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	81,00	%	80,85	99,81
		Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan terpadu lintas sektor	5,00	Jumlah	5	100,00
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	45,00	%	60,00	133,33
		Persentase keputusan hasil pengawasan risiko rendah dan sedang yang diselesaikan sesuai standar	93,00	%	100,00	107,53
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan PRRS	3,51	Indeks	4,35	123,93
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik terkait sarana dan produk pangan risiko rendah dan sedang	89,00	%	100,00	112,36
		Persentase permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	95,00	%	100,00	105,26
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	88,00	Indeks	85,75	97,44
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	75,00	Indeks	85,80	114,40
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang baik	1,51	Indeks	0,25	16,56
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang baik	Efisien (92%)	%	100,00	108,70
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	50,00	%	53,33	106,67
		Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	84,00	%	88,95	105,89
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	90,00	%	88,89	98,77

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	72,00	%	83,08	115,38
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	85,00	Indeks	85,16	100,19
		Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang memenuhi persyaratan CPOB	72,00	%	82,26	114,25
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	65,00	%	73,08	112,43
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,51	Indeks	3,89	110,83
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawalan inovasi pengembangan obat	60,00	%	61,11	101,85
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	85,00	Indeks	78,38	92,21
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	75,00	Indeks	87,40	116,53
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	1,51	Indeks	1,00	66,23
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Efisien (95%)	%	100,00	105,26
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	80,00	%	89,98	112,48
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	85,50	Indeks	82,60	96,61
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	78,00	%	89,68	114,98
		Persentase keputusan registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95,00	%	99,72	104,96
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,31	Indeks	4,56	105,80
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	75,00	%	92,05	122,74

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan	20,00	%	20,00	100,00
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	91,00	Indeks	89,73	98,60
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	75,00	Indeks	78,16	104,21
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	1,51	Indeks	1,00	66,23
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Efisien (96%)	%	100,00	104,17
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	70,00	%	88,53	126,47
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi Obat	82,00	Indeks	82,37	100,45
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	63,00	%	74,90	118,88
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	70,00	%	82,85	118,35
		Persen pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	3,51	Indeks	3,79	107,98
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	78,00	%	50,00	64,10
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	88,00	Indeks	80,85	91,88
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	75,00	Indeks	88,41	117,88
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	Efisien (92%)	%	100,00	108,70
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	85,00	%	93,29	109,75
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pratinlik/Klinik dan DIP	79,00	Indeks	81,49	103,15

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	68,00	%	82,41	121,19
		Persentase keputusan ketepatan waktu pelayanan publik dibidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Prakinik/ klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	70,00	%	84,61	120,87
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Prakinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	72,00	%	86,27	119,83
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,26	Indeks	4,24	130,06
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP	20,00	%	20,00	100,00
		Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Prakinik/Klinik dan DIP yang efektif	75,00	%	86,64	115,52
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	80,00	%	77,11	96,39
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	81,00	Indeks	81,42	100,52
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	75,00	Indeks	85,96	114,61
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	1,51	%	0,50	33,11
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Efisien (96%)	%	100,00	104,17
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	Indeks	87,53	108,06
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai Roadmap	80,00	%	171,43	214,29

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibandingkan dengan yang direncanakan	80,00	%	123,75	154,69
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada stakeholder yang efektif	85,00	%	100,00	117,65
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85,00	%	97,78	115,03
		Indeks RB Unit Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	Indeks	78,42	96,81
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77,00	Indeks	87,26	113,32
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Efisien (100%)	%	100,00	100,00
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	71,00	Indeks	85,14	119,92
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85,00	Indeks	83,88	98,68
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Pangan Olahan sesuai roadmap	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	91,00	%	100,00	109,89
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	88,00	%	93,40	106,14
		Persentase fasilitasi pengembangan Inovasi makanan melalui standar	72,00	%	78,00	108,33
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	85,00	%	98,50	115,88
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	3,91	Indeks	4,21	107,67

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88,00	Indeks	84,69	96,24
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	75,00	Indeks	85,70	114,27
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	1,51	Indeks	1,75	115,89
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Efisien (100%)	%	100,00	100,00
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71,00	Indeks	89,46	126,00
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sesuai roadmap	80,00	%	100,00	125,00
		Persentase standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	84,00	%	83,33	99,21
		Persentase sosialisasi standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada stakeholder yang efektif	92,00	%	91,19	99,12
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	85,00	Indeks	72,63	85,45
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	75,00	Indeks	80,57	107,43
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Efisien (100%)	%	100,00	100,00
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	40,00	UMKM	41,00	102,50
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRT	30,00	%	33,77	112,57
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	80,00	%	94,51	118,14

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	63,00	Kab/Kota	63,00	100,00
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	80,00	%	80,00	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	84,00	Indeks	86,90	103,45
		Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	9000,00	Jumlah	10500,00	116,67
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	150,00	Jumlah	164,00	109,33
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	nilai	91,75	104,71
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,11	Indeks	3,80	122,19
		Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	100,00	Prov/Kab/Kota	119,00	119,00
		Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks RB Dit PMPU	88,00	Indeks	77,09	87,60
		Indeks Profesionalitas ASN Dit PMPU	75,00	Indeks	86,33	115,11
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	1,51	Indeks	0,50	33,11
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPU	Efisien (90%)	%	100,00	111,11
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Nilai persentase pemenuhan laboratorium BPOM terhadap standar Kemampuan Laboratorium	71,00	%	72,60	102,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	84,50	Indeks	89,51	105,93
		Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,00	%	66,70	95,29
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	65,00	%	63,17	97,18
		Persentase Baku Pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan	70,00	%	69,00	98,57
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	79,00	%	70,38	89,09

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	91,00	%	95,71	105,18
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	3,91	Indeks	3,97	101,53
		Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	43,00	%	43,00	100,00
		Indeks RB PPPOMN	91,00	Indeks	83,06	91,27
		Nilai AKIP PPPOMN	80,00	nilai	75,70	94,63
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	75,00	Indeks	85,76	114,35
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	1,51	Indeks	1,25	82,78
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,40	nilai	86,06	92,14
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (90%)	%	100,00	111,11
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Tingkat Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan	50,00	%	64,00	128,00
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	70,00	%	90,91	129,87
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	70,00	%	84,62	120,88
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	45,00	%	48,54	107,87
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi SPDP	50,00	%	41,67	83,33
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	50,00	%	70,70	141,41
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85,00	Indeks	58,99	69,40
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	81,00	Indeks	82,97	102,43
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Efisien (88%)	%	75,00	85,23
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72,00	%	72,60	100,83
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100,00	%	100,00	100,00

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan timeline	80,00	%	91,05	113,81
		Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian	70,00	%	75,93	108,47
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	88,00	Indeks	73,11	83,08
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	80,00	nilai	75,05	93,81
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	75,00	Indeks	86,57	115,43
		Indeks pengelolaan data dan informasi PRKOM yang optimal	1,51	Indeks	0,75	49,67
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	93,00	nilai	90,60	97,42
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Efisien (92%)	%	100,00	108,70
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	41,00	nilai	40,35	98,41
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	opini	WTP	100,00
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	73,25	nilai	69,88*	95,40
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,50	Indeks	85,30	107,30
		Indeks Kepuasan Media	73,00	Indeks	74,02	101,40
		Indeks Opini Publik BPOM	66,00	Indeks	79,60	120,61
		Persentase kerjasama yang efektif	82,00	%	91,67	111,79
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	nilai	6,35*	98,76
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8,11	nilai	7,77	95,81
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mitra Kerja Inspektorat Utama	3,40	%	3,00	88,24
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditolerans	<1	%	0,06	100,95

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,00	%	93,47	106,22
2.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama	3,82	Indeks	3,83	100,26
		Presentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan	72,00	%	83,33	115,74
		Jumlah rekomendasi penguatan regulatori yang diterapkan oleh negara penerima KSS Badan POM	1,00	rekomendasi	1,00	100,00
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	81,00	%	81,40	100,49
		Jumlah dokumen Kerja Sama Badan POM	65,00	Dokumen	78,00	120,00
		Jumlah negara selatan-selatan penerima program KSS mengenai penguatan fungsi regulatori	1,00	negara	1,00	100,00
		Indeks RB Biro Kerja Sama	85,00	Indeks	68,57	80,67
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama	75,00	Indeks	79,67	106,23
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama	Efisien (80%)	%	100,00	111,11
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas	4,90	Nilai	4,86*	99,18
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,25	Nilai	69,88*	95,40
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93,00	Nilai	98,14	105,53
		Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM	94,24	Nilai	93,76	99,49
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standara Akuntansi Pemerintahan	100,00	%	100	100,00
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,79	Indeks	3,79	100,00
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman	85,00	%	87,53	102,98
		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	100	100,00

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme reward and punishment berdasarkan mekanisme reward and punishment	20,90	%	20,9	100,00
		Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	100	100,00
		Persentase laporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman	57,00	%	64,41	113,00
		Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal Baik	80,00	%	93,00	116,25
		Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase laporan PNB unit kerja yang disampaikan tepat waktu	95,00	%	98,00	103,16
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	85,00	Indeks	75,93	89,33
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	75,00	Indeks	80,48	107,31
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	1,51	Indeks	0,75	49,67
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)	Nilai	100	100,00
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3,40	Nilai	3,2*	94,12
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,40	Nilai	4,32*	98,18
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,20	Nilai	4,12*	98,10
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	3,55	Indeks	3,82	107,61
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79,00	%	79,00	100,00

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	82,00	%	96,43	117,60
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	91,00	Indeks	74,04	81,36
		Indeks Profesionalitas ASN	75,00	Indeks	83,36	111,15
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	1,51	%	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (95%)	Nilai	95,00	100,00
2.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,50	Indeks	85,30	107,30
		Indeks kepuasan media	73,00	Indeks	74,02	101,40
		Indeks opini publik BPOM	66,00	Indeks	79,60	120,61
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro HDSP	3,63	Indeks	3,63	100,00
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	Indeks	99,84	100,25
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,00	%	99,47	100,47
		Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Biro HDSP	88,98	Indeks	91,00	102,27
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Biro Humas dan DSP	3,91	Indeks	4,48	114,58
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon I	75,00	Nilai	85,37	113,83
		Indeks RB Biro HDSP	85,00	Indeks	70,21	82,60
		Indeks Profesionalitas ASN Biro HDSP	75,00	Indeks	78,66	104,88
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro HDSP yang optimal	1,51	Indeks	0,25	16,56
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro HDSP	Efisien (88%)	Nilai	100,00	113,64
2.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,22	Nilai	13,1*	99,09
		Nilai Pengelolaan BMN BPOM	80,00	Nilai	79,00	98,75

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,71	Indeks	3,80	102,43
		Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	89,00	%	99,94	112,29
		Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir	73,00	%	92,73	127,03
		Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	89,00	%	88,40	99,33
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar	78,00	%	92,90	119,10
		Persentase unit kerja yang mampu mengelola arsip dengan baik sesuai standar pengelolaan kearsipan	86,00	%	85,71	99,66
		Indeks RB Biro Umum dan SDM	88,00	Indeks	79,99	90,90
		Indeks Profesionalitas SDM Biro Umum dan SDM	75,00	Indeks	72,40	96,53
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Umum dan SDM yang Optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Biro Umum dan SDM	Efisien (100%)	Nilai	100,00	100,00
2.6	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM POM yang memenuhi Standar Kompetensi	75,00	%	72,73	96,97
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	530,00	SDM	536	101,13
		Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan	4,00	Nilai	3,87*	96,75
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	40,00	%	44,78	111,96
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	10,00	Dokumen	12,00	120,00
		Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,35	Nilai	4,53	104,14
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	90,00	%	100,00	111,11
		Persentase realisasi rencana aksi RB Badan POM terkait Manajemen Perubahan	86,00	%	100,00	116,28
		Indeks RB PPSDM POM	88,00	Indeks	76,57	87,01

1	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai AKIP PPSDM POM	81,00	Nilai	76,16	94,02
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	75,00	Indeks	85,38	113,84
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	1,51	Indeks	0,25	16,56
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	91,60	Nilai	83,22	90,85
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	Efisien (90%)	Nilai	100,00	111,11
2.7	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE Badan POM	3,80	Indeks	3,68	96,84
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	Baseline	%	100,00	100,00
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	2,80	%	3,01	107,50
		Nilai RB Badan POM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	4,63	Nilai	4,54*	98,06
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	80,00	%	92,95	116,19
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	15,00	%	12,00	80,00
		Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	25,00	%	25,00	100,00
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100,00	%	74,43	74,43
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90,00	Indeks	73,46	81,62
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80,00	Nilai	79,35	99,19
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	75,00	Indeks	76,91	102,55
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	1,51	Indeks	1,25	82,78
		Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, dan Data	Baseline	%	60,98	100,00
		Sertifikasi ISO 27001	1,00	Dokumen	1,00	100,00
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93,00	Nilai	90,40	97,20
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Efisien (88%)	Nilai	100,00	113,64

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	Nilai	6,35*	98,76
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	81,00	Nilai	77,66	95,88
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3,40	%	3,00	88,24
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat I	100,00	%	81,71	81,71
		Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	75,00	%	84,85	113,13
		Kualitas Laporan Keuangan BPOM Mitra Kerja Inspektorat I	< 1	%	0,06	100,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,00	%	93,47	106,22
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	82,00	Indeks	86,43	105,40
		Persentase perencanaan pengawasan intern Inspektorat I berbasis risiko sesuai pedoman	100,00	%	100,00	100,00
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	18,00	laporan	22	122,22
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat I yang sesuai standar	75,00	Nilai	74,99	99,99
		Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	90,00	%	94,29	104,76
		Persentase Hasil Penelusuran Pengaduan Lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti	80,00	%	100,00	125,00
		Indeks RB Inspektorat I	91,00	Indeks	80,97	88,98
		Indeks Profesionalisme ASN Inspektorat I	85,00	Indeks	87,05	102,41
		Persentase ASN Inspektorat I yang memenuhi standar kompetensi	85,00	%	100,00	117,65
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Nilai kinerja anggaran Inspektorat I	88,00	Nilai	97,32	110,59
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	Efisien (88%)	%	75,00	85,23

	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.9	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,43	Nilai	6,35*	98,76
		Nilai rata rata evaluasi AKIP mitra kerja inspektorat II	81,00	Nilai	77,88	96,15
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	100,00	%	81,70	81,70
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	<1	%	0,12	100,00
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja inspektorat II	82,00	Indeks	85,26	103,98
		Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	80,00	Indeks	86,91	108,64
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100,00	%	116,67	116,67
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat II	75,00	Nilai	74,99	99,99
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	90,00	%	92,07	102,30
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti secara tuntas	80,00	%	100,00	125,00
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100,00	%	90,77	90,77
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti	88,00	%	80,87	91,90
		Indeks RB Inspektorat II	91,00	Nilai	86,16	94,68
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,40	Indeks	3,00	88,24
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	85,00	Indeks	85,60	100,71
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	1,51	Indeks	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	Efisien (88%)	%	75,00	85,23

LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN VI TAHUN 2020
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(Per 1 Maret 2021)

Serapan Anggaran BPOM s.d Triwulan IV 2020

A. Unit Pusat

NO		PAGU	REALISASI	%REALISASI ANGGARAN
1	432731 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	328.548.378.000	284.410.751.968	86,57%
	BIRO KERJASAMA	4.643.490.000	4.616.897.761	99,43%
	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	13.142.724.000	12.937.720.800	98,44%
	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	7.834.426.000	7.771.634.713	99,20%
	BIRO HUMAS DAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	15.981.148.000	15.344.132.653	96,01%
	BIRO UMUM DAN SDM	286.946.590.000	243.740.366.041	84,94%
2	445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	36.289.215.000	36.160.069.555	99,64%
	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	7.626.503.000	7.599.461.730	99,65%
	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	7.361.005.000	7.358.345.538	99,96%
	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	6.538.311.000	6.525.921.416	99,81%
	DIT. REGISTRASI OBAT	7.614.050.000	7.547.965.259	99,13%
	DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	7.149.346.000	7.128.375.612	99,71%
3	445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	28.296.984.000	28.229.240.322	99,76%
	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	8.936.377.000	8.926.152.032	99,89%
	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	6.855.491.000	6.819.853.843	99,48%
	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	7.453.018.000	7.431.191.715	99,71%
	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	5.052.098.000	5.052.042.732	99,998906%
4	445170 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	37.857.088.000	37.795.383.559	99,84%
	DIT. PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	6.231.012.000	6.221.127.334	99,84%
	DIT. PENGAWASAN PANGAN OLAHAN RISIKO RENDAH DAN SEDANG	8.371.652.000	8.357.765.035	99,83%
	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	6.809.571.000	6.806.921.521	99,96%
	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	7.529.842.000	7.518.255.894	99,85%
	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	8.915.011.000	8.891.313.775	99,73%
5	632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	15.512.993.000	15.450.771.687	99,60%
	DIT. PENGAMANAN	5.108.511.000	5.097.977.547	99,79%
	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	5.650.707.000	5.602.079.952	99,14%
	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	4.753.775.000	4.750.714.188	99,94%
6	INSPEKTORAT UTAMA	16.110.999.000	15.821.544.087	98,20%
	INSPEKTORAT I	13.383.384.000	13.126.073.424	98,08%
	INSPEKTORAT II	2.727.615.000	2.695.470.663	98,82%
7	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	60.706.414.000	57.931.139.201	95,43%
8	PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	18.245.125.000	16.221.306.792	88,91%
9	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	49.320.849.000	47.922.859.981	97,17%
10	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	36.363.086.000	35.279.908.811	97,02%
	TOTAL SATKER PUSAT	627.251.131.000	575.222.975.963	91,71%

B. Balai Besar / Balai POM

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%REALISASI ANGGARAN
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	32.626.736.000	32.248.238.440	98,84%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	47.974.243.000	46.392.717.951	96,70%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	48.773.819.000	48.159.735.549	98,74%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	31.441.207.000	30.006.853.821	95,44%
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	51.903.352.000	50.182.937.923	96,69%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	30.732.516.000	29.747.906.558	96,80%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	37.416.885.000	35.408.091.835	94,63%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	38.496.037.000	37.568.648.118	97,59%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	32.831.631.000	31.859.514.817	97,04%
10	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	25.317.679.000	23.984.280.352	94,73%
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	29.255.452.000	28.544.085.934	97,57%
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	23.159.218.000	22.624.964.115	97,69%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	25.032.475.000	23.911.496.952	95,52%
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	22.800.803.000	21.803.273.783	95,63%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	26.704.835.000	24.982.811.972	93,55%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	25.428.331.000	25.190.296.509	99,06%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	31.844.852.000	31.502.539.955	98,93%
18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	21.111.850.000	20.690.826.710	98,01%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	45.992.042.000	41.272.184.951	89,74%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	19.583.980.000	18.707.189.694	95,52%
21	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	18.074.448.000	17.557.132.003	97,14%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	31.602.884.000	30.216.002.671	95,61%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	26.115.742.000	25.333.835.101	97,01%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	27.495.797.000	26.696.168.083	97,09%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	28.649.087.000	27.328.343.048	95,39%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	21.587.374.000	20.621.449.858	95,53%
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SERANG	25.251.465.000	24.497.503.504	97,01%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BATAM	19.778.169.000	19.106.592.726	96,60%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PANGKAL PINANG	15.779.716.000	14.539.868.067	92,14%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN GORONTALO	13.166.952.000	12.506.311.200	94,98%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANOKWARI	14.976.844.000	14.782.921.623	98,71%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	10.723.420.000	10.485.082.786	97,78%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	15.946.238.000	15.840.705.077	99,34%
	TOTAL SATKER DAERAH	917.576.079.000	884.300.511.686	96,37%
	TOTAL SATKER PUSAT DAN DAERAH	1.544.827.210.000	1.459.523.487.649	94,48%





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN IV TAHUN 2020



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



www.pom.go.id



021 4244691



@bpom_ri



halobpom@pom.go.id



Bpom RI